



HARI

anak
yatim

2021

KABUPATEN
BONE BOLANGO
11 JANUARI 2021



CERIA DAN
BAHAGIA BERSAMA

BONE BOLANGO PEKANINI

Assalamualaikum..

Seperti Pandemi membuat dunia berubah dan secara cepat banyak melakukan perubahan dan inovasi. Kambungu pun demikian, selain edisi cetak yang di publikasi setiap bulan. Kambungu kini hadir setiap pekan lewat e-magazine berjudul Kominfo Bonebol Sepukan.

Majalah elektronik yang mulai dilaunching awal pekan di bulan Januari 2021 ini akan menyajikan rangkuman berita yang terjadi selama sepekan. Program pemerintah teranyar hingga dinamika kependudukan.

Selain itu apa lagi? Berawal dari minimnya fasilitas di Dinas Kominfo Bone Bolango memacu rekan-rekan untuk berfikir kreatif. Salah satunya lewat rubrik HPtografi. HPtografi adalah rubrik bagi peminat fotografi lewat smartphone atau bahasa kerennya smartphone fotografi.

Ini baru awal, perubahan dan inovasi akan tetap dilakukan Bidang Komunikasi Dinas Kominfo Bone Bolango. Tetap semangat, tetap sehat. Mari kita bangun Bone Bolango tercinta ini. AFIK

TIM REDAKSI

PEMBINA

KEPALA DINAS KOMINFO
SUGONDONO MAKMUR

PEMIMPIN UMUM

KEPALA BIDANG KOMUNIKASI
DEDI IRVANDI ARIFIN

PEMIMPIN REDAKSI / PENANGGUNGJAWAB

TAUFIK ASNAWI

REDAKSI

ABDUL KADIR PAKAYA
ZAKIR PAKAYA
APRIS NAWU
INDRA F SAUD

DESAIN GRAFIS MARSEL MALAGE

DINAS KESEHATAN BONE BOLANGO

BERSIAP SAMBUT VAKSIN SINOVAC

Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango bersiap menyambut kedatangan Vaksin Sinovac yang telah tiba hari ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, dr. Meyrin Kadir mengatakan untuk Provinsi Gorontalo sendiri mendapat jatah 9.760.

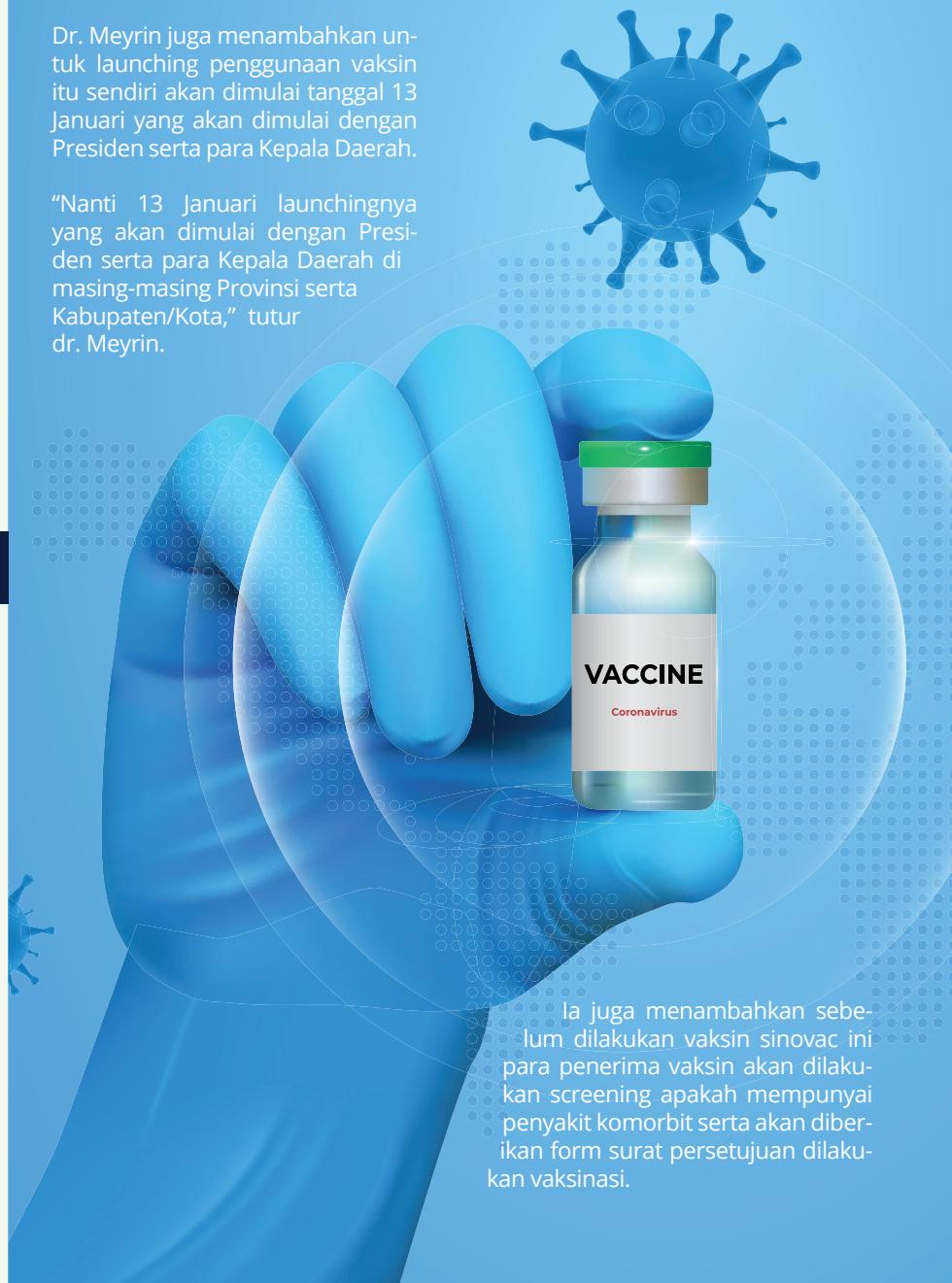
"Itu untuk semua Kabupaten/Kota yang ada di Gorontalo. Namun untuk Bone Bolango sendiri kita belum tahu mendapat jatah vaksin berapa," kata dr. Meyrin.

Dr. Meyrin juga menambahkan untuk launching penggunaan vaksin itu sendiri akan dimulai tanggal 13 Januari yang akan dimulai dengan Presiden serta para Kepala Daerah.

"Nanti 13 Januari launchingnya yang akan dimulai dengan Presiden serta para Kepala Daerah di masing-masing Provinsi serta Kabupaten/Kota," tutur dr. Meyrin.

Lebih lanjut dr. Meyrin mengatakan di Bone Bolango juga vaksin tersebut akan diberikan kepada tenaga medis serta masyarakat.

"Kita sudah mendata ada 600 tenaga medis namun tidak semua tenaga medis akan diberikan vaksin karena ada tenaga medis yang mempunyai komorbit seperti punya riwayat hipertensi, jantung, diebetes serta masih ada yang menyusui," ucap dr. Meyrin.



la juga menambahkan sebelum dilakukan vaksin sinovac ini para penerima vaksin akan dilakukan screening apakah mempunyai penyakit komorbit serta akan diberikan form surat persetujuan dilakukan vaksinasi.

HARI ANAK YATIM 2021

HADIR DI TENGAH PANDEMI

**Sebanyak 42 Anak Yatim
Jalani Khitanan Massal
di Kabupaten Bone Bolango**



TAHUN ke tujuh pelaksanaan Hari Anak Yatim digelar Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Untuk Tahun ke tujuh ini, HAY tetap digelar. Kali ini sebanyak 42 anak yatim di Kabupaten Bone Bolango mengikuti Khitanan Massal, Kamis (7/1/2021).

Khitanan masal kali ini digelar di setiap kecamatan se Kabupaten Bone Bolango secara serentak. Di kecamatan Tapa misalnya, terdapat 6 anak yang mengikuti khitanan masal dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, dr. Meyrin Kadir



mengatakan khitanan massal ini dilakukan dalam rangka memperingati hari anak yatim di Kabupaten Bone Bolango. "Ini merupakan rangkaian dari peringatan hari anak yatim tanggal 11 Januari nanti di Kabupaten Bone Bolango," ucapan dr. Meyrin Kadir.

dr. Meyrin Kadir menambahkan tahun kemarin khitanan massal dilakukan di Banthayo namun untuk sekarang karena masih dalam masa pandemi maka dilakukan di masing-masing puskesmas yang ada di tiap Kecamatan. "Jumlahnya 42 orang yang dikhitan dan terbagi di 12 Puskesmas yang ada di masing-masing Kecamatan" ucapan dr. Meyrin. Untuk puncak perayaannya sendiri kata dr. Meyrin Kadir akan dilakukan langsung



dimasing-masing Kecamatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Sementara itu Bupati Hamim Pou mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk menyantuni, melayani, membela, dan menjaga anak yatim.

Untuk data khitanan massal untuk anak yatim di Kabupaten Bone Bolango sendiri sejak dilakukan pertama kali di Tahun 2017 hingga 2021 sudah sebanyak 457 anak yatim dilakukan khitanan massal oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

HARI ANAK YATIM

DARI MASA KE MASA

TAHUN
2015-2016

FESTIVAL ANAK YATIM

Kegiatan berupa lomba dan santunan bagi anak yatim melalui tabungan BRI Brio



TAHUN
2017-2021

berubah menjadi

HARI ANAK YATIM

Kegiatan berupa santunan, sunatan massal dan beat

BEAT KHITANAN

2017	-	82
2018	200	147
2019	50	90
2020	74	96
2021	30	42



Semarak 18 Tahun Bone Bolango

MENKOPOLHUKAM, MENPANRB, KEPALA BKPM DIJADWALKAN RESMIKAN MPP BONEBOL

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Mahfud MD, Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo hingga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan melakukan peresmian langsung Mall Pelayanan Publik Bone Bolango (MPP Bonebol).



Pelaksanaan rapat persiapan rencana peresmian MPP Bonebol yang diikuti 21 instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik dan dipimpin langsung Sekda Ishak Ntoma, di ruang Multi Fungsi MPP Bonebol, Kamis (7/1/2021). (F.AKP)

PERESMIAN Mall Pelayanan Publik Bone Bolango sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2021 yang diintegrasikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bone Bolango ke-18 tahun 2021.

Hal ini terungkap pada rapat persiapan rencana peresmian Mall Pelayanan Publik Bone Bolango yang diikuti 21 instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik dan dipimpin langsung Sekda Bone Bolango Ishak Ntoma, di ruang Multi Fungsi Mall Pelayanan Publik, Kamis (7/1/2021). "Hari ini kita melaksanakan rapat dalam rangka persiapan peresmian Mall Pelayanan Publik yang akan

diintegrasikan dengan peringatan HUT Bone Bolango yang ke-18 tahun 2021," kata Sekda Ishak Ntoma.

Sekda mengungkapkan adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat di antaranya segala hal yang berhubungan dengan fasilitas sarana dan prasarana kebutuhan, baik itu tenaga kerja ataupun peralatan dalam rangka pelayanan publik yang sudah disiapkan di gedung MPP Bonebol. "Insya Allah itu akan disiapkan dalam waktu dekat ini," ungkap Ishak Ntoma.

Selain itu, lanjut Sekda hal-hal lain yang dibahas adalah yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama

(PKS) dengan 21 instansi pelayanan publik di MPP Bonebol. Itu juga sudah disiapkan konsepnya yang nanti akan ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2021.

"Untuk tanggal 18 Januari 2021 ini, yang 21 instansi tersebut mereka akan bersama-sama melakukan persiapan uji coba sistem pelayanan terpadu di MPP Bonebol sebelum diresmikan pada tanggal 27 Januari 2021 mendatang," ujar Sekda Ishak Ntoma yang turut didampingi Kepala DPMPTSPTK Bone Bolango Djumaidil

Kemudian beberapa hal yang juga menjadi perhatian kita, jelas Sekda Ishak Ntoma, adalah skenario maupun tentatif acara yang dijadwalkan akan dihadiri langsung oleh Menkopolhukam, MenPAN-RB, dan Kepala BKPM tersebut.

Diakhir penyampaiannya Sekda Ishak pun berharap dengan hadirnya seluruh instansi atau 21 instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik yang ditempatkan di MPP Bone Bolango, maka pelayanan bagi masyarakat Bone Bolango akan semakin dekat, lebih lancar, lebih cepat, lebih terjamin, lebih aman, lebih murah dan tidak ada korupsi.

"Sesuai dengan motto HUT Bonebol ke-18, yakni bekerja melayani, bersih tanpa korupsi," pungkas Sekda Ishak Ntoma yang juga Ketua Korpri Bone Bolango itu.

Pantauan di lokasi rapat tersebut diikuti pejabat maupun pimpinan di 21 instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik, di antaranya Kantor Imigrasi Provinsi Gorontalo, Dirlantas Polda Gorontalo, Polres Bone Bolango, KPP Pratama Gorontalo, Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo, Kemenag Bone Bolango, Dinas Dukcapil Bone Bolango.

Selanjutnya, BKPD Bone Bolango, DPMPTSPTK Bone Bolango, Badan Pertanahan Bone Bolango, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, Kantor Samsat Bone Bolango, Jasaraharja Provinsi Gorontalo, PT. PLN Gorontalo, Bank Sulutgo Cabang Suwawa, PDAM, BKAD Provinsi Gorontalo, PT Telkom Cabang Gorontalo, dan PT Telkomsel Cabang Gorontalo.



Nampak kotak gratifikasi diletakkan di ruang Mall Pelayanan Publik (MPP) Bone Bolango. (f.dok.istimewa)

MALL PELAYANAN PUBLIK BONE BOLANGO DILENGKAPI KOTAK GRATIFIKASI

SEBAGAI bentuk dukungan terhadap wilayah zona integritas di Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui Inspektorat Daerah setempat melengkapi dan menyediakan kotak gratifikasi yang diletakkan di ruang Mall Pelayanan Publik (MPP) Bone Bolango. Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPKT) Kabupaten Bone Bolango, Jumaidil, mengatakan fungsi disediakan kotak gratifikasi ini untuk meletakkan pemberian yang diberikan oleh masyarakat kepada petugas di MPP Bone Bolango.

"Kotak gratifikasi ini disediakan tujuannya untuk mencegah kita berperlakuan menerima semua bentuk gratifikasi. Biasanya ada juga orang yang memberikan itu dengan ikhlas tapi dalam mencegahnya kita tetap menolak, sehingga kita sediakan kotak gratifikasi disini," jelas Jumaidil saat diwawancara awak media, di MPP Bone Bolango, Selasa (5/1/2021).

Jumaidil menambahkan jika masih ada orang maupun masyarakat yang bersikeras untuk tetap memberikan

uang atau gratifikasi kepada petugas di MPP Bone Bolango, maka uang pemberian tersebut akan dimasukkan di kotak gratifikasi dan akan menjadi kas daerah maupun negara. "Jadi kalau ada masyarakat yang tetap mau memberikan uang sebagai imbalan atau ucapan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh petugas di MPP Bone Bolango kepada masyarakat. Ya silahkan diisi di kotak gratifikasi. Uangnya tidak bisa diamamil, nantinya itu akan masuk ke kas daerah maupun kas negara," terang Jumaidil.

Jumaidil menegaskan jika ada petugas maupun pegawai di MPP Bone Bolango yang didapat menerima gratifikasi, maka yang bersangkutan pasti akan diberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

"Kalau ada petugas di MPP Bone Bolango yang ketahuan menerima gratifikasi, pasti sanksinya pidana. Sudah jelas diundang-undang Tipikor menerima pungutan liar dan menerima hadiah apapun, itu masuk gratifikasi," tegas Jumaidil.

Cegah Keterlambatan Gaji,

INI YANG DILAKUKAN BKPD BONE BOLANGO

PEMERINTAH Daerah Kabupaten Bone Bolango berupaya agar tidak ada keterlambatan pembayaran gaji ASN dan Honorer. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Bone Bolango Jusni Bolilio mengatakan pihaknya dalam penyusunan APBD dilingkungan Pemda Bone Bolango menggunakan dua aplikasi. "Yaitu aplikasi SIPD dan aplikasi SIMDA milik pemerintah daerah," ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam penyusunan APBD dua aplikasi ini digunakan secara bersamaan sehingga jika terjadi permasalahan dengan salah satu aplikasi tersebut maka aplikasi yang satunya bisa digunakan. "Contohnya kemarin SIPB bermasalah maka kita gunakan SIMDA sehingga tak ada keterlambatan pembayaran gaji ASN bahkan kita yang tercepat se provinsi Gorontalo dalam melakukan pembayaran gaji ASN dan Honorer," tegasnya.

Disisi lain Bupati Hamim Pou selalu mengingatkan kepada para pimpinan SKPD agar selalu membayarkan hak para pegawai pada tepat waktu. "Meskipun dalam masa pandemi sekarang saya selalu mengingatkan kepada para pimpinan SKPD agar tidak ada keterlambatan pembayaran gaji para ASN maupun para honorer," ucap Hamim Pou.

Hamim Pou juga berharap agar kinerja ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Bone Bolango terus ditingkatkan. "Agar Bone Bolango bisa dua kali lebih baik dua kali lebih cemerlang," tegasnya.



Jusni Bolilio



Fredy H. Achmad

ASN BONEBOL WAJIB LAPORKAN HARTA KEKAYAAN YANG DIMILIKI

LHKPN Penyelenggara Negara dan ASN Kabupaten Bone Bolango Segera Dituntaskan

Pemerintah Bone Bolango menargetkan LHKPN para ASN di Bone Bolango selesai pertengahan Januari 2021. Ini disampaikan Kepala Inspektorat Bone Bolango, Fredy H. Achmad, Rabu (6/1/2021). "Untuk data terakhirnya pada tanggal 5 januari kemarin sudah mencapai separuh dari jumlah ASN di Bone Bolango yang melaporkan LHKPN mereka. Kita menargetkan pekan depan atau 11 Januari semuanya sudah rampung," ungkap Fredy H. Achmad.

Ia menambahkan bahwa LHKPN ini menjadi suatu kewajiban bagi para penyelenggara negara maupun ASN pada setiap tahun melaporkan harta kekayaan yang dimiliki. "Ini sudah menjadi kewajiban setiap tahunnya. Baik penyelenggara negara maupun ASN wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencegah tindak pidana korupsi," ungkapnya.

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa yang menjadi objek pelaporan harta kekayaan bagi para penyelenggara negara maupun ASN adalah harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak yang bisa dinilai dengan uang. "Contohnya kendaraan seperti mobil dan motor serta harta yang tidak bergerak seperti rumah dan tanah," tutur Fredy.

Ditahun 2020 kemarin, Fredy mengatakan untuk pelaporan LHKPN baik penyelenggara negara maupun ASN di lingkungan Kabupaten Bone Bolango progresnya mencapai 100 persen. Sementara ditahun 2021 ini Pemerintah Pusat menargetkan 31 Januari semua LHKPN sudah rampung.

TEKNIS KESESUIAN PENATAAN TATA RUANG

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bone Bolango (TKPRD Bonebol) kembali melakukan rapat bersama. Rapat kali ini menghadirkan instansi teknis yang masuk dalam TKPRD, di antaranya Dinas PUPR, Bappeda-Litbang, DPMPTSPTK, dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.



Rapat yang digelar di ruang multi fungsi Mall Pelayanan Publik (MPP) Bone Bolango tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah Ishak Ntoma, selaku Ketua TKPRD Bone Bolango, Rabu (6/1/2021). Sekda Bone Bolango Ishak Ntoma mengatakan rapat TKPRD kali ini dilaksanakan guna membahas rekomendasi teknis kesesuaian penataan tata ruang untuk lokasi pembangunan perumahan di Desa Popodu, Kecamatan Bulango Timur dan juga lokasi pembangunan rumah khusus Lansia di Desa Kramat, Kecamatan Tapa.

Untuk rekomendasi teknis kesesuaian penataan tata ruang lokasi pembangunan perumahan di Desa Popodu, itu lahannya belum mencapai 2 hektar atau sesuai persyaratan luasnya harus 1,6 hektar. Saat ini, kata Ishak Ntoma, yang dimohonkan pemohon baru sekitar 8.000 meter, belum mencapai 1,6 hektar sesuai dengan persyaratan rekomendasi teknis kesesuaian penataan tata ruang. Akan tetapi mereka ada lahan lain."Jadi lahannya ada di dua tempat yang luasnya lebih dari 1,6 hektar,"kata Sekda Ishak Ntoma.

Olehnya itu, lanjut Sekda, TKPRD pada kesempatan rapat tersebut meminta pemohon maupun pengembang agar mereka membangun lebih dulu Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di dua lokasi yang nantinya mereka akan bangun perumahan tersebut. Salah satunya pembangunan maupun pembuatan jalan masuk ke lokasi perumahan.

"Pembangunan jalan masuk menjadi persyaratan utama untuk perumahan. Lebar jalan pun paling kurang 6 meter,"jelas Sekda Ishak Ntoma yang didampingi Kepala DPMPTSPTK Jumaidil, Sekretaris Dinas PUPR Zulfahmid Lalijo, Sekretaris Bappeda Litbang Kristianto Alfairuz Ruchban, dan para Kepala Bidang di instansi teknis yang masuk dalam TKPRD.

